



PUTUSAN
Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 11 Januari 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawinnya berupa uang senilai Rp. 201.013,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan



- Agama Kabupaten Bangka sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah sampai sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat di Kabupaten Bangka;
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak umur 3 (tiga) tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 bulan pertama, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat berkali-kali tidak menafkahi Penggugat selama Tergugat tidak masuk kerja karena atasan Tergugat di Polres Kabupaten Bangka Selatan memberikan kebijakan kepada Tergugat untuk tidak mendapatkan gaji jika Tergugat tidak masuk bekerja pada Februari 2014 – Mei 2014, Desember 2014, Januari 2015 – April 2015, November 2015, Januari 2016 –Oktober 2016, hingga Tergugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat pada 14 Juni 2016;
 - b. Tergugat melanggar komitmen untuk rajin bekerja yang pada saat itu pekerjaannya yaitu anggota POLRI. Tergugat sudah diketahui bahwa sebelum menikah sudah memiliki banyak masalah di tempat Tergugat bekerja, hanya saja pada saat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah berkomitmen agar Tergugat tidak lagi mengulangi perilaku-perilaku buruknya seperti desersi dan menggunakan obat-obatan terlarang, akan tetapi Tergugat masih melakukan desersi pada Februari 2014-Mei 2014, Januari 2015 – April 2015, desersi berulang lagi pada Januari 2016 sampai pada Juni 2016 dan Tergugat di Pecat Tidak Dengan Hormat sebagai anggota POLRI. Upaya yang dilakukan Penggugat untuk mendukung Tergugat berubah setiap minggu



Penggugat selalu mengantarkan Tergugat pergi bekerja sampai ke Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah setiap jam setengah lima subuh, dengan membawa anak yang masih bayi serta ibu dari Penggugat, sedangkan pukul tujuh pagi Penggugat sudah harus masuk bekerja di RSUD Provinsi, tetapi ternyata diketahui bahwa Tergugat tidak pernah sampai ke kantor Polres Kabupaten Bangka Selatan tempat Tergugat bekerja. Penggugat juga pernah memberikan motor dan mobil untuk digunakan pergi berdinan, namun Penggugat tetap tidak pergi berdinan dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ada dimana selama tidak masuk bekerja;

c. Tergugat juga diketahui pernah mengulang kebiasaan buruk yaitu menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu di bulan April 2014 dan dalam kondisi Penggugat sedang hamil 5 bulan, yang kemudian diketahui orangtua Penggugat pada Agustus 2014 namun Penggugat baru mengetahui pada Agustus 2017 melalui surat pemecatan Tergugat yang terungkap pada daftar pelanggaran Tergugat selama menjadi anggota POLRI dan ternyata banyak pelanggaran yang masih terjadi setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat merasa banyak dibohongi selama menjadi istri dari Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pada 10 Juli 2017 yang disebabkan bermula ketika Penggugat marah dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan berbohong ketika anak opname dan mertua Penggugat menitipkan uang untuk membantu biaya pengobatan tapi malah dipakai dan digunakan oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah bilang kepada Penggugat sedangkan Penggugat mengetahui hal tersebut dari mertua Penggugat sendiri. Sehingga membuat Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama serta terus menerus bersabar dan bertahan dengan ketidakjujuran Tergugat. Penggugat merasa bahwa Tergugat bukannya membantu perekonomian keluarga, malah semakin tidak bertanggung jawab, banyak perselisihan yang terjadi sejak Tergugat di pecat dan berpengaruh pada rasa percaya Penggugat kepada Tergugat,



sehingga membuat Penggugat merasa tidak bisa berbakti dan menghormati Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat Kota Pangkalpinang selama lima bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai saat ini;
8. Bahwa keluarga Tergugat sama sekali tidak ada usaha menasehati, mendamaikan atau pun mencari Penggugat sehingga membuat Penggugat semakin yakin mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sudah merasa cukup bersabar terhadap tingkah laku Tergugat dan merasa terlalu kecewa dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa Penggugat meminta hak pengasuhan anak ada pada Penggugat dan tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, **Atau**;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 29 Januari 2018, tanggal 19 Pebruari 2018 dan tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan olehnya sendiri secara lisan dalam persidangan tanggal 08 Maret 2018, perbaikan mana pada pokoknya Penggugat memperbaiki dalil gugatannya posita angka 2 yang semula tertulis "*setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat di Kabupaten Bangka*" diperbaiki menjadi "*setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Kabupaten Bangka sampai berpisah*";

Bahwa perbaikan gugatan Penggugat selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara siang mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2013 di Sungailiat;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi), kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat (umah saksi) yang lainnya;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun dan sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat malas bekerja yang mana Penggugat setiap pagi hari mengantar Tergugat pergi bekerja, namun ternyata Tergugat tidak masuk kerja dan setelah Tergugat dipecat dari anggota Polri, Tergugat tidak juga



mencari pekerjaan yang baru, sebab lain karena dari hasil pemeriksaan di Polres ternyata Tergugat memakai Narkoba;

- sepengetahuan saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2017 yang disebabkan Penggugat diberitahu oleh ibu Tergugat bahwa ibu Tergugat menitip uang kepada Tergugat untuk biaya opname anak Penggugat dan Tergugat dan saat ditanyakan kepada Tergugat, mereka jadi bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama \pm 8 (delapan) bulan lamanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Pangkalpinang, lalu Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
- sepengetahuan saksi selama keduanya berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui selama keduanya berpisah, pihak keluarga tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- saksi sebagai orangtua Pengugat sudah berupaya menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2013 di Kabupaten Bangka dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;



- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan milik orangtua Penggugat;
 - saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan mereka bertengkar;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama \pm 8 (delapan) bulan lamanya;
 - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kota Pangkalpinang, lalu Penggugat tinggal serumah dengan orangtuanya;
 - sepengetahuan saksi selama keduanya berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
 - saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarganya ada atau tidak berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat selama keduanya pisah tempat tinggal;
3. **Saksi III**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2013 di Sungailiat dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah saksi);
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 6 bulan dan sejak tahun bulan April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat malas bekerja yang mana dari rumah berangkat untuk bekerja ternyata Tergugat tidak masuk kerja;
- bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan tahun 2016 Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bangka Tengah;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama \pm 8 bulan lamanya;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Pangkalpinang, lalu Penggugat tinggal serumah dengan orangtuanya;
- bahwa sepengetahuan saksi selama keduanya berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, sejak pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat mengajak rukun kembali;



- bahwa saksi mengetahui selama keduanya berpisah, pihak keluarga tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat,



tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya keduanya telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 29 Januari 2018, tanggal 19 Pebruari 2018 dan tanggal 21 Maret 2018 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat periksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu sudah tidak harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dari



bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA tersebut tanggal, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jls Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **Saksi I**, 2) **Saksi II**, dan 3) **Saksi III**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka



saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2013 di Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama serumah dengan orangtua Penggugat, kemudian mereka pindah dan tinggal sendiri di rumah milik orangtua Penggugat yang lain /rumah kontrakan milik orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak perempuan berumur ± 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah Tergugat yang malas bekerja yang mana Tergugat dari rumah berangkat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak masuk kerja hingga akhirnya Tergugat diberhentikan dari profesinya sebagai Anggota Kepolisian dan setelah Tergugat di berhentikan/dipecat dari Anggota Polri, Tergugat tidak juga mencari pekerjaan yang baru;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang ini telah berlangsung selama ± 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kota Pangkalpinang, kemudian Penggugat pun tinggal serumah dengan orangtuanya;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarganya tidak lagi berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang ini telah berlangsung selama \pm 8 (delapan) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan yang tajam dan terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali, pihak keluarganya tidak lagi berkeinginan untuk menyatukan dan merukunkan keduanya serta upaya



damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Penggugat telah gagal dan sia-sia saja, Penggugat telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Tergugat kepersidangan dianggap Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berlanjut terus dan berkepanjangan, oleh karenanya patutlah diyakini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup



berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi hingga sekarang ini telah berjalan selama selama \pm 8 (delapan) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19



huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dan pihak keluarga dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai keadaan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa setentang Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hubungannya dengan gugatan cerai yang diajukannya dalam perkara *a quo*, Penggugat bersamaan dengan surat gugatannya telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 445/019/RSUDP/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung tanggal 10 Januari 2018 dan dari surat tersebut terungkap fakta yang intinya Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat atasannya yang berwenang dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan prosedur perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinanya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang



bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya atau dzalim dan bertentangan dengan ruh dan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:



"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدّ عدم الرغبة ا لزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **Penggugat.** untuk bercerai dengan Tergugat **Tergugat** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula dipersidangan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita gugatan angka 10, oleh karena dalil tersebut tidak jelas dan terang serta pula tidak dilengkapi dengan petitum sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan dan mendukung tuntutanannya dianggap telah dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri,S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 601.000,-
(Enam ratus satu ribu rupiah).	